



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 25 Januari 2018

Halaman: 1

SLEMAN—Selama tiga pekan di awal 2018, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) DIY telah menerima lima aduan dari khalayak tentang dugaan pungli.

Irwan A. Syambudi & Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com

Ketua Satgas Saber Pungli DIY Kombes Pol Budi Yuwono mengatakan dari lima laporan yang masuk, satu sudah diurut. "Yang lainnya masih dalam proses," kata dia kepada *Harian Jogja*, Rabu (24/1).

Satu aduan yang sudah ditangani adalah dugaan pemerasan yang melibatkan Iwan Ariwanto, tenaga bantuan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja. Sementara itu, pada 2017 lalu, Satgas Saber Pungli

Selama 2017, Satgas Saber Pungli menerima 50 pengaduan dari publik.

Pemerintah Kota Jogja bakal memberikan sanksi berat kepada pegawai negeri atau tenaga bantuan yang berperilaku lencang.

menerima 50 pengaduan. Laporan tersebut meliputi tiga aduan di Penda DIY, 10 di Kota Jogja, 16 di Sleman, 13 di Bantul, dua di Kulonprogo, dan enam di Gunungkidul.

"Dari 50 laporan, sebanyak 49 disampaikan melalui laman resmi dan pesan singkat, sedangkan satu laporan melalui email saberpungli@diy.go.id," kata Kombes Pol Budi Yuwono, Kepala Inspektur Pengawasan Daerah (Irwada) Polda DIY.

● Lebih Lengkap Halaman 8

5 Pungli Dilaporkan dalam Tiga Pekan

5 Pungli Dilaporkan...

Iwan Ariwanto diringkus dalam operasi tangkap tangan Satgas Saber Pungli DIY pada Kamis (18/1) malam. Dia tertangkap basah saat meminta pelicin pengurusan izin jalan masuk (*in gang*) sebesar Rp12,5 juta kepada pengusaha warnet di halaman parkir Netcity. Sebelumnya, dia sudah meminta upeti pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada korban yang sama sebesar Rp15 juta.

Penangkapan Iwan adalah operasi kedua Satgas Saber Pungli DIY sejak dibentuk pada 1 November 2016. Sebelumnya, Satgas meringkus delapan pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Jogja dan menetakkan satu orang sebagai tersangka. Pemberantasan pungli merupakan salah satu ikhtiar pemerintah untuk memuluskan investasi. Pungli dianggap muncul dari perizinan yang berbelit-belit sehingga pegawai di sebuah jawatan memanfaatkan untuk mengutip uang haram.

Sejak akhir Oktober 2016 hingga pengujung 2017, Satgas Saber Pungli di tingkat Pusat sudah menerima 25.171 aduan dari masyarakat. Enam wilayah yang paling banyak diadukan adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung. Satgas Saber Pungli kemudian menggelar 934 OTT dan menetakkan 1.899 tersangka pungli di seluruh Nusantara. Jumlah barang bukti yang disita sebanyak Rp315 miliar. Nilai barang bukti terbesar yang dirampas adalah Rp298 juta di Kalimantan Timur, dan yang paling kecil Rp400.000 di Papua Barat.

Mencoreng Reputasi

Dibekuknya Iwan Ariwanto telah mencoreng reputasi Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja. Wakil Wali Kota Jogja Heroe Pherwadi menyatakan Iwan Ariwanto atau siapa pun yang menyelewengkan kekuasaan bakal diberi sanksi berat.

"Dia semestinya memahami kontrak kerja dan komitmen yang sudah dibuat. Dia telah menodai komitmen yang selama ini kami jaga bersama. Jelas ada sanksi tegas karena dia sudah merusak teman-teman yang sudah bekerja dengan baik," tegas Heroe, di Balai Kota Jogja, Rabu.

Pemkot saat ini masih menunggu hasil kajian dari DLH, Inspekturat, dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jogja, untuk menentukan apakah sanksi berupa pemecatan bisa dijatuhkan sesudah status hukum terhadap Iwan berkekuatan hukum tetap atau belum.

Heroe mengatakan perizinan *in gang* pengusaha warnet yang diperas Iwan sebenarnya sudah kelar. Namun ia tidak menyangka proses itu masih bisa dimanfaatkan oleh Iwan untuk kepentingan pribadi. "Padahal layanan perizinan di Pemerintah Kota Jogja saat ini sudah sangat transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," ucap Heroe.

Wakil Wali Kota meminta kepada semua pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jogja agar menjadikan kasus tersebut sebagai pembelajaran. Heroe juga meminta Inspekturat dan Tim Saber Pungli Kota Jogja untuk menelusuri kemungkinan adanya potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan pegawai, baik pegawai negeri sipil maupun tenaga bantuan. "Tidak ada ampun bagi yang mencoreng," ujar Heroe.

Ia juga meminta kepada para pengusaha agar mengurus proses perizinan sendiri tanpa melalui calo supaya jelas dan tidak diminta upeti. Pemkot Jogja, menurut Heroe, terus mencari terobosan agar semua layanan publik bisa diakses lebih mudah, transparan, dan dapat menekan biaya-biaya yang tidak perlu demi mendorong iklim usaha yang sehat dan memiliki daya saing kuat.

Koordinator Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Jogja Harry Cahya prihatin masih adanya pegawai Pemkot yang korup, padahal sudah ada komitmen untuk menjunjung tinggi pakta integritas pegawai. Dia juga meminta Pemkot mengurut kemungkinan adanya pegawai lain yang lencang.

"Peristiwa OTT ini bisa menjadi pintu masuk mengembangkan kasus ini, karena patut diduga tersangka tidak bekerja sendiri, pihak lainnya juga perlu ditelusuri," kata Harry.

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

.....

la

is

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005